



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 10.B/LHP/XIX.TER/5/2021 tanggal 19 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 19 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Warsaya S.E., M.Ak., Ak., CA.

ab Register Negara Akuntan No. RNA-10430



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)	(%)	Realisasi 2019 (audited)
PENDAPATAN - LRA	A.1	767.622.211.493,00	749.537.692.317,04	97,64	831.144.718.349,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	A.1.1	39.916.194.408,00	25.424.480.282,20	63,69	35.417.864.456,11
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	A.1.1.1	14.489.390.000,00	6.265.317.382,98	43,24	3.101.378.348,06
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	A.1.1.2	16.465.139.450,00	11.976.957.530,00	72,74	17.931.718.828,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	A.1.1.3	370.201.365,00	370.201.365,00		0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	A.1.1.4	8.591.463.593,00	6.812.004.004,22	79,29	14.384.767.280,05
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	A.1.2	715.503.588.585,00	712.230.355.632,00	99,54	775.007.123.879,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA		588.796.987.618,00	587.703.321.981,00	99,81	656.532.567.832,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	A.1.2.1	7.628.090.322,00	6.194.876.245,00	81,21	5.488.799.300,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	A.1.2.2	20.787.578.296,00	19.712.495.633,00	94,83	15.318.728.587,00
Dana Alokasi Umum - LRA	A.1.2.3	365.535.460.000,00	364.322.788.000,00	99,67	404.673.835.000,00
Dana Alokasi Khusus - LRA	A.1.2.4	194.845.859.000,00	197.473.162.103,00	101,35	231.051.204.945,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	A.1.2.5	116.706.331.000,00	116.706.331.000,00	100,00	109.588.662.589,00
Dana Penyesuaian - LRA		116.706.331.000,00	116.706.331.000,00	100,00	109.588.662.589,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	A.1.2.6	10.000.269.967,00	7.820.702.651,00	78,20	8.826.823.458,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		10.000.269.967,00	7.820.702.651,00	78,20	8.826.823.458,00
Bantuan Keuangan - LRA	A.1.3	0,00	0,00		59.070.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	A.1.3.1	0,00	0,00		0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA		0,00	0,00		59.070.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	A.1.4	12.202.428.500,00	11.882.856.402,84		20.719.730.014,47
Pendapatan Hibah - LRA	A.1.4.1	800.000.000,00	769.317.589,00	-	10.484.207.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA		11.402.428.500,00	11.113.538.813,84		10.235.523.014,47
BELANJA	A.2	898.789.284.212,03	773.905.273.356,52	86,11	707.784.949.103,39
BELANJA OPERASI	A.2.1	431.455.679.670,03	391.689.088.596,48	90,78	412.811.353.622,39
Belanja Pegawai	A.2.1.1	241.736.780.322,03	223.940.708.970,00	92,64	217.048.127.754,00
Belanja Barang dan Jasa	A.2.1.2	182.090.099.348,00	160.172.393.626,48	87,96	177.984.232.326,39
Belanja Subsidi	A.2.1.3	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Hibah	A.2.1.4	3.708.800.000,00	3.708.400.000,00	99,99	2.647.900.000,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.1.5	3.920.000.000,00	3.867.536.000,00	98,66	15.131.093.542,00
BELANJA MODAL	A.2.2	429.026.907.542,00	345.233.184.305,04	80,47	294.502.893.981,00
Belanja Tanah	A.2.2.1	6.963.305.600,00	6.351.343.854,00	91,21	16.413.066.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin	A.2.2.2	51.148.970.152,00	46.440.721.866,00	90,80	54.018.058.205,00
Belanja Bangunan dan Gedung	A.2.2.3	229.551.377.633,00	166.478.279.100,00	72,52	131.417.011.492,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.2.4	138.608.004.157,00	123.258.968.535,04	88,93	87.234.392.964,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	A.2.2.5	2.755.250.000,00	2.703.870.950,00	98,14	5.420.364.720,00
BELANJA TAK TERDUGA	A.2.3	38.306.697.000,00	36.983.000.455,00	96,54	470.701.500,00
Belanja Tak Terduga	A.2.3.1	38.306.697.000,00	36.983.000.455,00	96,54	470.701.500,00
TRANSFER	A.2.4	117.244.673.559,00	115.258.443.143,00	98,31	115.619.038.874,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	A.2.4.1	1.558.391.050,00	1.558.390.978,00	100,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		629.572.172,40	629.572.172,00	100,00	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		928.818.877,60	928.818.806,00	100,00	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	A.2.4.2	115.686.282.509,00	113.700.052.165,00	98,28	115.619.038.874,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		115.442.866.109,00	113.456.636.165,00	98,28	115.420.474.174,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		243.416.400,00	243.416.000,00	100,00	198.564.700,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(248.411.746.278,03)	(139.626.024.182,48)	56,21	7.740.730.372,19
PEMBIAYAAN	A.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.3.1	203.510.854.874,82	142.972.367.474,82	70,25	-3.929.875.497,37
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		3.510.854.874,82	3.510.854.874,82	100,00	-3.184.181.360,37
Pinjaman Dalam Negeri		200.000.000.000,00	139.461.512.600,00	69,73	
Koreksi Silpa		0,00	-	-	-745.694.137,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.3.2	2.370.000.000,00	370.000.000,00	15,61	300.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					300.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	A.3.2.1	2.370.000.000,00	370.000.000,00	15,61	
PEMBIAYAAN NETTO		201.140.854.874,82	142.602.367.474,82	70,90	-4.229.875.497,37
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)/(SIKPA)		(47.270.891.403,21)	2.976.343.292,34	(6,30)	3.510.854.874,82

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Handwritten signature and date: 2020